

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 032.07.1.622145/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 12
Tanggal : 01 Agustus 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 2. Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
- Sebesar : Rp. 1.247.482.788.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	991.080.888.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	73.940.500.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	182.461.400.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	148.717.400.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	33.744.000.000	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	181.961.400.000	2. KPPN JAKARTA VI	(175) Rp.	1.065.521.388.000
-----------------------------------	-----------	-----------------	--------------------	-----------	-------------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

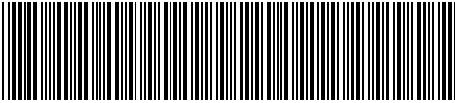
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025



DS:3636-1498-0529-1190

Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

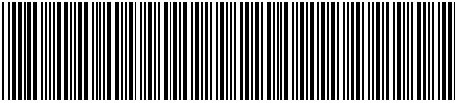
04	EKONOMI	Rp.	1.022.845.262.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp.	1.022.845.262.000
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	224.637.526.000
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Rp.	224.637.526.000

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025

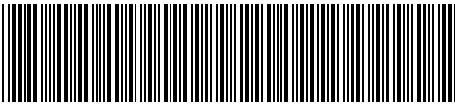


DS:3636-1498-0529-1190

Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp.	189.897.526.000
FD.2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	Rp.	187.111.696.000
FD.4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.	2.785.830.000
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	947.286.495.000
HB.2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Rp.	890.164.557.000
HB.2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp.	22.381.938.000
HB.2366	Penataan Ruang Laut	Rp.	34.740.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	110.298.767.000
WA.2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Rp.	110.298.767.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
I A. INFORMASI KINERJA

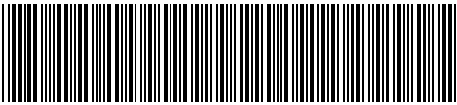


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Program	:	032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				189.897.526.000		
Kegiatan	:	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				187.111.696.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:								
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2362.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		8,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	550.296.000	
Rincian Output	:	01	PFA.001	Dokumen NSPK Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan		(PN)	8.00	NSPK	550.296.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2362.QMA	Data dan Informasi Publik		11,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.100.000.000	
Rincian Output	:	01	QMA.001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem		(PN)	5.00	dokumen	500.000.000
			02	QMA.002		Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	6.00	dokumen	600.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2362.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		17.800.000,00	Hektar, Ton	182.461.400.000	
Rincian Output	:	01	REA.004	Oceans for Prosperity Project - LAUTRA		(PN)	17800000.00	Hektar	182.461.400.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies		25,00	Jenis	3.000.000.000	
Rincian Output	:	01	REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)		(PN)	25.00	Jenis	3.000.000.000
Kegiatan	:	4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				2.785.830.000		
	:								
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4346.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	557.680.000	
Rincian Output	:	01	PFA.001	Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		(PN)	3.00	NSPK	557.680.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
I A. INFORMASI KINERJA

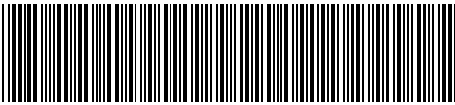


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4346.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		2,00	Kelompok Masyarakat	1.127.510.000
Rincian Output		:	01	QDD.001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	1,00	Kelompok Masyarakat	141.680.000
		:	02	QDD.002	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap mitigasi Bencana	1,00	Kelompok Masyarakat	985.830.000
					(PN)			
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4346.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat		1,00	Kelompok Masyarakat, Titik, Paket, SR	701.870.000
Rincian Output		:	01	QEH.003	Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih	1,00	Kelompok Masyarakat	701.870.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4346.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		5,00	Hektar, Ton	398.770.000
Rincian Output		:	01	REA.001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	5,00	Hektar	398.770.000
					(PN)			
Program		:	032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				947.286.495.000
Kegiatan		:	2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan				890.164.557.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2363.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		9,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.805.650.000
Rincian Output		:	01	ABW.001	Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	4,00	Rekomendasi Kebijakan	2.220.650.000
		:	02	ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perairan	5,00	Rekomendasi Kebijakan	3.585.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2363.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		2,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	233.841.000
Rincian Output		:	01	AFA.051	Dokumen NSPK Jasa Kelautan	2,00	NSPK	233.841.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
I A. INFORMASI KINERJA

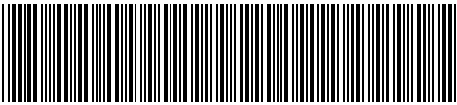


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Klasifikasi Rincian Output	3	:	2363.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		26,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	17.200.000.000
Rincian Output		:	01	PBW.001	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi (PN)	5.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
		:	02	PBW.002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut (PN)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
		:	03	PBW.003	Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam (PN)	11.00	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000
		:	04	PBW.004	Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT (PN)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	4.200.000.000
		:	05	PBW.005	Rekomendasi kebijakan pengelolaan sedimentasi di laut (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000.000
		:	06	PBW.006	Rekomendasi Kebijakan Berusaha Jasa Kelautan (PN)	5.00	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2363.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		7,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	8.550.000.000
Rincian Output		:	01	PFA.001	Dokumen NSPK Jasa Kelautan (PN)	7.00	NSPK	8.550.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2363.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana		1,00	Unit, Titik, Paket, SR	3.900.000.000
Rincian Output		:	01	QEG.003	Sarana niaga Garam Rakyat	1.00	Unit	3.900.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	2363.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan		1.000,00	Unit	743.445.720.000
Rincian Output		:	01	RAI.002	Lahan Garam Yang Direvitalisasi (PN)	1000.00	Hektar	743.445.720.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	2363.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		17,00	Unit	110.029.346.000
Rincian Output		:	01	RBQ.001	Prasarana Usaha Garam (PN)	17.00	Unit	110.029.346.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
I A. INFORMASI KINERJA

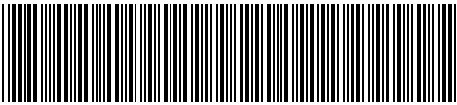


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Klasifikasi Rincian Output	8	:	2363.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		20,00	Orang, Kegiatan	1.000.000.000
Rincian Output		:	01	SCC.001	Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya (PN)	20.00	Orang	1.000.000.000
Kegiatan		:	2365		Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			22.381.938.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	9	:	2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		15,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.199.999.000
Rincian Output		:	01	PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PN)	12.00	Rekomendasi Kebijakan	6.600.000.000
		:	02	PBW.002	Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PN)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	1.599.999.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	2365.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		2,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	581.939.000
Rincian Output		:	01	PFA.001	Dokumen NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PN)	1.00	NSPK	200.000.000
		:	02	PFA.002	Dokumen NSPK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PN)	1.00	NSPK	381.939.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	2365.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		4,00	Kelompok Masyarakat	2.100.000.000
Rincian Output		:	01	QDD.001	Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya (PN)	2.00	Kelompok Masyarakat	900.000.000
		:	02	QDD.003	Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya (PN)	2.00	Kelompok Masyarakat	1.200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	2365.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana		55,00	Unit, Titik, Paket, SR, Peta, Data, Lokasi	7.000.000.000
Rincian Output		:	01	QEG.001	Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PN)	55.00	Unit	7.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
I A. INFORMASI KINERJA

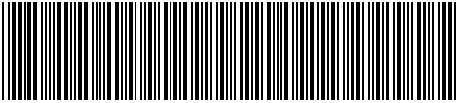


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Klasifikasi Rincian Output	13	:	2365.QMA	Data dan Informasi Publik		4,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi dokumen	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	QMA.001	Dokumentasi Data dan Informasi Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PN)	4.00		2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	2365.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		1,00	Unit	2.500.000.000
Rincian Output		:	01	RBQ.001	Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PN)	1.00	Unit	2.500.000.000
Kegiatan		:	2366	Penataan Ruang Laut				34.740.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	15	:	2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		560,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	10.500.000.000
Rincian Output		:	01	PBT.007	Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) (PN)	500.00	Rekomendasi Kebijakan	8.200.000.000
		:	02	PBT.010	Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut (PN)	60.00	Rekomendasi Kebijakan	2.300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	16	:	2366.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	16.100.000.000
Rincian Output		:	01	PBW.001	Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (PN)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000.000
		:	02	PBW.002	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN (PN)	3.00	Rekomendasi Kebijakan	3.250.000.000
		:	03	PBW.003	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN (PN)	10.00	Rekomendasi Kebijakan	3.500.000.000
		:	04	PBW.007	Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
		:	05	PBW.008	Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (PN)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
		:	06	PBW.009	Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi (PN)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.100.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
I A. INFORMASI KINERJA



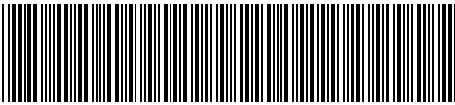
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	17	:	2366.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.440.000.000
Rincian Output		:	01	PFA.001	Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut (PN)	4.00	NSPK	1.440.000.000
Klasifikasi Rincian Output	18	:	2366.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		39,00	Unit	1.200.000.000
Rincian Output		:	01	RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (PN)	39.00	Unit	1.200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	19	:	2366.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		16,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	5.500.000.000
Rincian Output		:	01	UBA.003	Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi (PN)	10.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.400.000.000
		:	02	UBA.004	Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PN)	4.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.100.000.000
		:	03	UBA.005	Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut (PN)	2.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000
Program		:	032.07.WA	Program Dukungan Manajemen				110.298.767.000
Kegiatan		:	2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				110.298.767.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2367.AEC	Kerja sama		5,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	2.640.800.000
Rincian Output		:	01	AEC.051	Layanan Kerjasama Sub Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	5.00	Dokumen	2.640.800.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		29,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	100.418.724.000
Rincian Output		:	01	EBA.956	Layanan BMN	10.00	Layanan	803.970.000
		:	02	EBA.957	Layanan Hukum	11.00	Layanan	3.677.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3636-1498-0529-1190

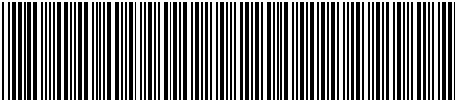
Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Layanan Dukungan Manajemen Internal				Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		
	03	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4.00	Layanan	1.637.000.000
	04	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	2.511.300.000
	05	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	5.826.366.000
	06	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	1.241.200.000
	07	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	84.721.888.000
Klasifikasi Rincian Output	3	: 2367.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50,00	Unit, m2, Paket	825.883.000
Rincian Output	: 01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	50.00	Unit	825.883.000
Klasifikasi Rincian Output	4	: 2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	962,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.567.000.000
Rincian Output	: 01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	962.00	Orang	1.567.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	: 2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	18,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.846.360.000
Rincian Output	: 01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.00	Dokumen	2.203.227.000
	02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.00	Dokumen	1.069.465.000
	03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3.00	Dokumen	1.404.861.000
	04	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Dokumen	168.807.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
I B. SUMBER DANA



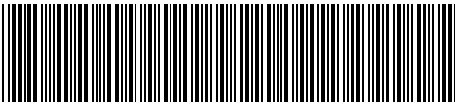
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.247.482.788.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0
1. Rupiah Murni	Rp.	991.080.888.000		(2) RPLN	US\$	10.186.124
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	182.461.400.000		(2) RHLN	US\$	2.311.233
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	INTERNATIONALBANK	USD						
		IBRD9498-ID	USD	9.294,84					
		193QECRA	IDR	148.717.400,00	3	148.717.400			
2	2	INTERNATIONALBANK	USD						
		TF0C0368-TF0C0495	USD	2.109,00					
		28SUA71A	IDR	33.744.000,00	3	33.744.000			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



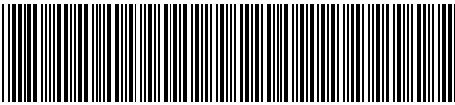
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	70.520.735	598.437.996	578.524.057	-	-	1.247.482.788	01 . 00	
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	185.736.950	4.160.576	-	-	189.897.526		
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	-	182.951.120	4.160.576	-	-	187.111.696		
2362.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	550.296	-	-	-	550.296		
04	PNBP	-	550.296	-	-	-	550.296		
2362.QMA	Data dan Informasi Publik (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000		
04	PNBP	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000		
2362.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	178.300.824	4.160.576	-	-	182.461.400		
02	PLN	-	144.056.824	4.160.576	-	-	148.217.400		
02	PLN	-	500.000	-	-	-	500.000		
09	HLN	-	33.744.000	-	-	-	33.744.000	140@	RK 28SUA71A

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



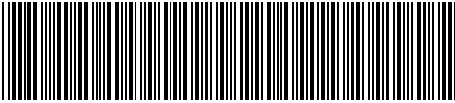
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 00	
	(01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)								
04	PNBP	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	175@	
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	2.785.830	-	-	-	2.785.830		
4346.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	557.680	-	-	-	557.680	01 . 00	
	(01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)								
01	RM	-	557.680	-	-	-	557.680	175@	
4346.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	-	1.127.510	-	-	-	1.127.510	01 . 00	
	(01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)								
01	RM	-	1.127.510	-	-	-	1.127.510	175@	
4346.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	-	701.870	-	-	-	701.870	01 . 00	
	(01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)								
01	RM	-	701.870	-	-	-	701.870	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



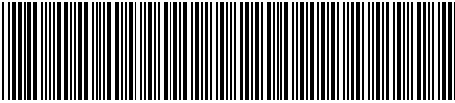
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4346.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	398.770	-	-	-	398.770	01 . 00	
01 RM		-	398.770	-	-	-	398.770	175@	
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	-	373.848.897	573.437.598	-	-	947.286.495		
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	-	318.994.959	571.169.598	-	-	890.164.557		
2363.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	5.805.650	-	-	-	5.805.650	01 . 00	
04 PNB		-	5.805.650	-	-	-	5.805.650	175@	
2363.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	233.841	-	-	-	233.841	01 . 00	
04 PNB		-	233.841	-	-	-	233.841	175@	
2363.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	17.200.000	-	-	-	17.200.000	01 . 00	
01 RM		-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

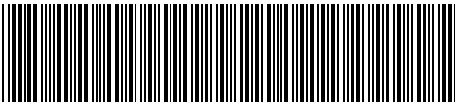


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
04 PNB		-	14.900.000	-	-	-	14.900.000	175@	
2363.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	8.550.000	-	-	-	8.550.000	01 . 00	
01 RM		-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	175@	
04 PNB		-	7.050.000	-	-	-	7.050.000	175@	
2363.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	3.900.000	-	-	-	3.900.000	01 . 00	
01 RM		-	3.900.000	-	-	-	3.900.000	175@	
2363.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	237.421.720	506.024.000	-	-	743.445.720	01 . 00	
01 RM		-	237.421.720	506.024.000	-	-	743.445.720	175	
2363.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	44.883.748	65.145.598	-	-	110.029.346	01 . 00	
01 RM		-	44.883.748	65.145.598	-	-	110.029.346	175	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

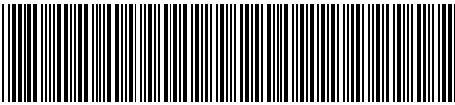


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2363.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 00	
	01 RM	-	700.000	-	-	-	700.000	175@	
	04 PNBP	-	300.000	-	-	-	300.000	175@	
	2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	21.423.938	958.000	-	-	22.381.938		
2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	7.399.999	800.000	-	-	8.199.999	01 . 00	
	01 RM	-	500.000	-	-	-	500.000	175@	
	04 PNBP	-	6.899.999	800.000	-	-	7.699.999	175@	
	2365.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	581.939	-	-	-	581.939	01 . 00	
01 RM		-	321.225	-	-	-	321.225	175@	
	04 PNBP	-	260.714	-	-	-	260.714	175	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

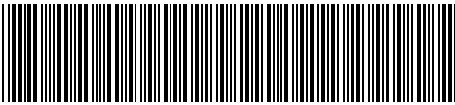


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2365.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	1.942.000	158.000	-	-	2.100.000	01 . 00	
01	RM	-	600.000	-	-	-	600.000	175@	
04	PNBP	-	1.342.000	158.000	-	-	1.500.000	175@	
2365.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 00	
01	RM	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	175	
04	PNBP	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	175@	
2365.QMA	Data dan Informasi Publik (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 00	
04	PNBP	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	175@	
2365.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	01 . 00	
01	RM	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



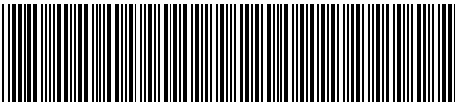
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNB		-	500.000	-	-	-	500.000	175@	
2366	Penataan Ruang Laut	-	33.430.000	1.310.000	-	-	34.740.000		
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	10.500.000	-	-	-	10.500.000	01 . 00	
01 RM		-	2.399.999	-	-	-	2.399.999	175@	
04 PNB		-	8.100.001	-	-	-	8.100.001	175@	
2366.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	15.990.000	110.000	-	-	16.100.000	01 . 00	
01 RM		-	3.600.001	-	-	-	3.600.001	175@	
04 PNB		-	12.389.999	110.000	-	-	12.499.999	175@	
2366.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	1.440.000	-	-	-	1.440.000	01 . 00	
04 PNB		-	1.440.000	-	-	-	1.440.000	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



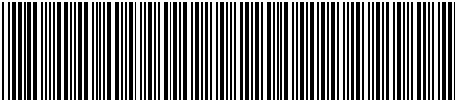
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2366.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	-	1.200.000	-	-	1.200.000	01 . 00	
04	PNBP	-	-	1.200.000	-	-	1.200.000	175@	
2366.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	01 . 00	
01	RM	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	175@	
04	PNBP	-	4.300.000	-	-	-	4.300.000	175@	
032.07.WA	Program Dukungan Manajemen	70.520.735	38.852.149	925.883	-	-	110.298.767		
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	70.520.735	38.852.149	925.883	-	-	110.298.767		
2367.AEC	Kerja sama (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	2.640.800	-	-	-	2.640.800	01 . 00	
01	RM	-	2.640.800	-	-	-	2.640.800	175@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	70.520.735	29.797.989	100.000	-	-	100.418.724	01 . 00	
01 RM		70.520.735	29.797.989	100.000	-	-	100.418.724	175@	
2367.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	-	825.883	-	-	825.883	01 . 00	
01 RM		-	-	825.883	-	-	825.883	175	
2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	1.567.000	-	-	-	1.567.000	01 . 00	
01 RM		-	1.567.000	-	-	-	1.567.000	175@	
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	4.846.360	-	-	-	4.846.360	01 . 00	
01 RM		-	4.846.360	-	-	-	4.846.360	175@	
JUMLAH		70.520.735	598.437.996	578.524.057	-	-	1.247.482.788		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

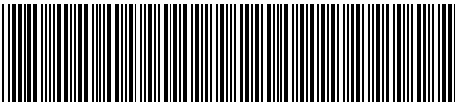
ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (622145) SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

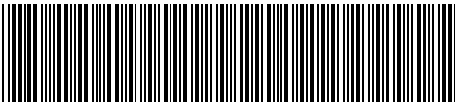
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
032.07.WA.2367		52 BELANJA BARANG DAN JASA	279.560	811.883	199.611	318.440	116.909	187.947	407.553	1.214.820	1.324.634	4.078.901	7.576.366	16.913.376	33.430.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	25.264	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.736	1.310.000
		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	2.451.621	5.055.308	10.092.837	4.632.176	4.453.239	9.183.134	5.426.977	5.108.603	4.813.354	10.043.413	10.132.992	38.905.111	110.298.767
		51 BELANJA PEGAWAI	1.758.253	4.148.267	8.886.479	4.443.239	4.443.239	8.899.717	4.200.956	4.200.956	4.200.956	4.200.956	4.200.956	16.936.761	70.520.735
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	693.368	907.040	1.206.358	188.937	10.000	283.417	400.139	907.647	612.399	5.842.458	5.932.036	21.868.350	38.852.149
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	825.883	0	0	0	0	100.000	925.883
		PERKIRAAN PENERIMAAN	118.973.868	118.973.868	118.973.868	118.973.868	118.973.868	118.973.868	118.973.868	118.973.868	118.973.868	118.973.868	118.973.868	118.973.882	1.427.686.430
		- PNBP (421541)	35.593.750	35.593.750	35.593.750	35.593.750	35.593.750	35.593.750	35.593.750	35.593.750	35.593.750	35.593.750	35.593.750	35.593.750	427.125.000
		- PNBP (425134)	213.271	213.271	213.271	213.271	213.271	213.271	213.271	213.271	213.271	213.271	213.271	213.276	2.559.257
		- PNBP (425259)	82.584.347	82.584.347	82.584.347	82.584.347	82.584.347	82.584.347	82.584.347	82.584.347	82.584.347	82.584.347	82.584.347	82.584.356	991.012.173
		- PNBP (425629)	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500	6.990.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R



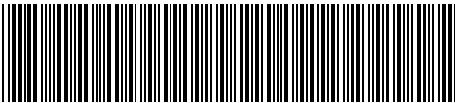
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 132.836.897		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.000
	52 Belanja Barang Rp. 129.183.572		Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	53 Belanja Modal Rp. 3.653.325		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	032.07.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	2362 Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 400.000
	2362.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 137.300		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 232.000
2362.QMA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	2362.REA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000		521211 Belanja Bahan(PLN)
	Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 795.272
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Perpres No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 206.996		521211 Belanja Bahan(HLN)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 164.280
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2362.QMA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 170.000	522131	Belanja Jasa Konsultan(PLN)
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.354.338
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Data dan Informasi Publik		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		522131 Belanja Jasa Konsultan(HLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 396.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.235.253
	Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Efisiensi Inpres 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R



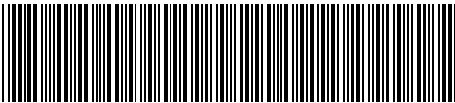
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
522141	Belanja Sewa(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.280.000 Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.905.136 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(HLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.120 Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 398.392 Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 246.600 Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(HLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.000 Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(HLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 201.200 Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.805.664 Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522191	Belanja Jasa Lainnya(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.000 Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(HLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 664.400 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522191	Belanja Jasa Lainnya(HLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 135.000 Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.646.867 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.608.157 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(HLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.920.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(HLN)	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(PLN)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R



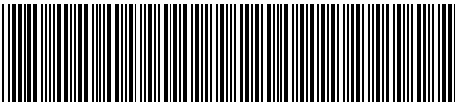
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN				
2362.REB		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.000.000	4346.QDD		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 3.200		
	Disposisi:	banper tidak sesuai dengan kriteria belanja sumber PHLN				Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025			
	526113	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
		Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(PLN)			522151	Belanja Jasa Profesi(RM)			
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.000.000			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 43.000		
		banper tidak sesuai dengan kriteria belanja sumber PHLN				Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025			
	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(PLN)			524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.000.000			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 267.860		
		banper tidak sesuai dengan kriteria belanja sumber PHLN				Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025			
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PLN)		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)					
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 1.535.325		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 33.780				
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025				
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	Konservasi Jenis/Spesies			524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)				
522131	Belanja Jasa Konsultan(PNBP)				Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 27.262			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 1.377.726			Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025				
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)				
4346					Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 103.250			
					Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025				
4346.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	521211	Belanja Bahan(RM)			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 56.428	521211	Belanja Bahan(RM)				
		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 258.513			
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025				
522141	Belanja Sewa(RM)			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
				521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R



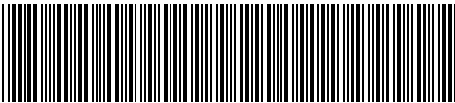
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4346.QEH	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.000 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4346.REA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.370 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.000 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.000 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(RM)		522141 Belanja Sewa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.900 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.000 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.900 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.500 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 367.401 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 298.031 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.610 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.650 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.250 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	Bantuan Kelompok Masyarakat		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R



DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN	
032.07.HB 2363 2363.ABW	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 5.000	2363.AFA	inpres 1 2025	
	Disposisi: Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 169.200
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 29.703		inpres 1 2025	
	Disposisi: Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524119 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.618.325
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 900		inpres 1 2025	
	Disposisi: Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	526311 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	
	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(RM)			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 26.860
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 100.000		inpres 1 2025	
	Disposisi: Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)			
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 123.060	
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan			inpres 1 2025		
2363.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		2363.AFA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521211 Belanja Bahan(PNBP)			524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 276.715		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 431.290
	inpres 1 2025			inpres 1 2025	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya(PNBP)			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 4.100		521211 Belanja Bahan(PNBP)	
inpres 1 2025		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 33.781		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		inpres 1 2025			
522141 Belanja Sewa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 160.400	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)			

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

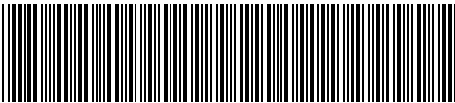
Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN		
2363.PBW		Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 18.000	521211	Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 1.182.760	
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 60.000	522141	Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 5.817	
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 5.100	522141	Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 179.080	
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 93.600	522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 128.700	
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 23.360	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 353.900	
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan				522191	Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Blokir Efisiensi KL TA 2025	Rp. 229.500
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Inpres no 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja tahun 2025	Rp. 10.000	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 940.399
	521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan inpres 1 2025	Rp. 117.164	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R



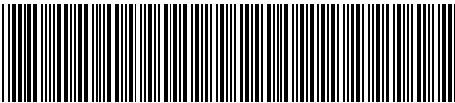
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2363.PFA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 850.942 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 311.980 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.443.200 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522141	Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.400 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.850 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 824.875 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 236.400 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 719.396 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.000 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.935.755 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 296.741 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.945 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.459.050 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R



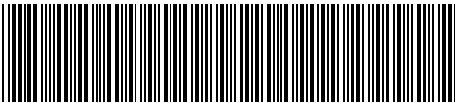
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.A. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2363.QEG	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.500 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	2363.SCC	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 126.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 198.050 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.370 Inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 143.000 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(RM) Catatan Penyelesaian tunggakan pekerjaan penataan lahan dan pipanisasi rumah garam di aceh besar 1 Paket Rp164.836.000, dan di Aceh Utara 1 Paket Rp165.872.000 Penyelesaian tunggakan pekerjaan sarana pendukung rumah garam di Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Aceh Utara 1 paket Rp278.153.400
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 534.320 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.545.739 Inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 855.220 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.235.800 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.600 Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Bantuan Peralatan / Sarana		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.800 Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.250 Inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 217.400 Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R

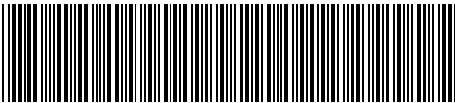


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN	
2365 2365.PBW	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		Rp. 120.000		522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		Rp. 320.000		522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		Rp. 259.200		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan			524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		Rp. 14.554		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	521211	Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		Rp. 383.660		524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
522141	Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Rp. 150		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025	
522141	Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025				
	Rp. 317.000				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R

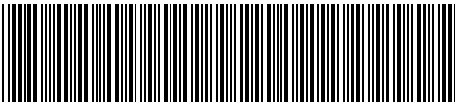


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2365.PFA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	2365.QDD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.800		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.500
	Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 500.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.500
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 700.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 84.300
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	521211 Belanja Bahan(RM)		521211 Belanja Bahan(RM)
2365.PFA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.044	2365.QDD	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.745
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(RM)		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.700		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 115.394
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		522131 Belanja Jasa Konsultan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.700		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.000
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		522141 Belanja Sewa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 130.080		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.800
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R

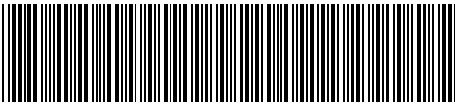


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 37.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52.450
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.800		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.500		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 108.000
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Bantuan Peralatan / Sarana
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 335.834	2365.QEG	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(PNBP)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 61.200
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 619.656	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025	522141	Belanja Sewa(PNBP)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 289.300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.075	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.149.500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.000	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Data dan Informasi Publik
		521211	Belanja Bahan(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R



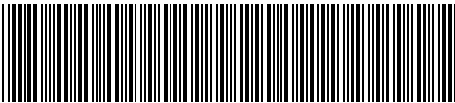
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.A. 12
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2365.RBQ	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 472.325 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.025 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		522141 Belanja Sewa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 267.800 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.250 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.000 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.000 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 224.825 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 221.625 belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP, Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 911.800 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.850 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.250 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.250 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.000 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000.000 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R

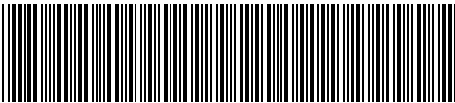


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2366	Penataan Ruang Laut		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.400 effisiensi anggaran
521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 161.640 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja TA 2025
521211	Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 264.484 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 197.347 effisiensi anggaran
522141	Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000 Blokir Kode A	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 278.760 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
522141	Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.548 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		2366.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.400 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025	521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 241.168 effisiensi anggaran
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 262.516 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.091.821 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.408.209 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522131	Belanja Jasa Konsultan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 756.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R



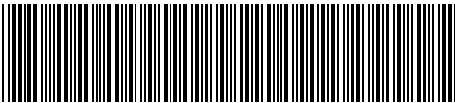
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.A. 14
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(RM)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 192.750		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.600
	effisiensi anggaran		effisiensi anggaran
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 318.656		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.011.250
	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.669		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.348.313
	effisiensi anggaran		effisiensi anggaran
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 563.200		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.996.237
	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 556.169		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 110.000
	kebijakan penyesuaian belanja negara		Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	2366.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.170	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 213.206
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.356.600	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R

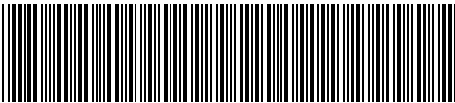


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2366.RAL	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.600 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025	522151	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 104.600 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 135.288 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.800 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 148.954 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.495.700 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 483.390 Arahan Presiden dalam sidang kabinet, belum dilengkapi ijin penggunaan PNBP		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
2366.UBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 440.000 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200.000 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 741.500 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 160.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 136.146 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.133.040 Blokir Efisiensi Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.214 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R

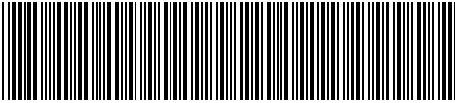


DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
032.07.WA 2367 2367.AEC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	2367.EBA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.575
	Program Dukungan Manajemen		Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kerja sama		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 305.700
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.078		Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025
	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 98.882		Arahan Presiden dalam sidang kabinet
	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	522141 Belanja Sewa(RM)		521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.366		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.883
	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja TA 2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		521211 Belanja Bahan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 37.200		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.336.425
	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.210
	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja TA 2025		Inpres no.1 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		522111 Belanja Langganan Listrik(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 340.125		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.014
	Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		522112 Belanja Langganan Telepon(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R



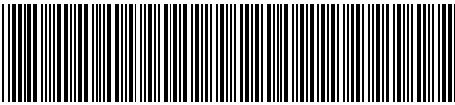
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.A. 17
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.855 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 445.596 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 507.700 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 396.593 Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 257.200 Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.565 inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	2367.EBC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.578.754 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 63.070 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.645.069 Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.836.862 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Manajemen SDM Internal 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.309 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 121.580 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 59.200 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV A. B L O K I R



DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

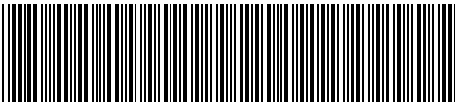
Halaman : IV.A. 18
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2367.EBD	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 260.000 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 299.978 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.200 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.000 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 477.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 192.390 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 385.160 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 430.500 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.200 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.557.090 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.700 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 182.319 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 333.185 Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522141 Belanja Sewa(RM)		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV B. C A T A T A N



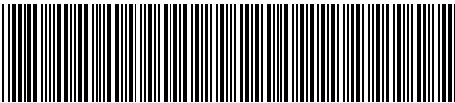
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT		
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan		
2363.QEG	Bantuan Peralatan / Sarana Rp. 2.154.601	522191	* Penambahan dari SP SABA Rp. 67.800 * Penambahan dari SP SABA Rp. 36.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 3.600 * Penambahan dari SP SABA Rp. 3.600 Belanja Jasa Lainnya * Penambahan dari SP SABA Rp. 300.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 100.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 980.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 1.600.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 11.100.000
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda * Penyelesaian tunggakan pekerjaan penataan lahan dan pipanisasi rumah garam di aceh besar 1 Paket Rp164.836.000, dan di Aceh Utara 1 Paket Rp165.872.000 Penyelesaian tunggakan pekerjaan sarana pendukung rumah garam di Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Aceh Utara 1 paket Rp278.153.400	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa * Penambahan dari SP SABA Rp. 723.720 * Penambahan dari SP SABA Rp. 398.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 5.010.200 * Penambahan dari SP SABA Rp. 1.368.640 * Penambahan dari SP SABA Rp. 1.007.640 * Penambahan dari SP SABA Rp. 240.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 330.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 145.500 * Penambahan dari SP SABA Rp. 48.000
2363.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan Rp. 743.445.720	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota * Penambahan dari SP SABA Rp. 3.400
521211	Belanja Bahan * Penambahan dari SP SABA Rp. 128.090 * Penambahan dari SP SABA Rp. 81.150 * Penambahan dari SP SABA Rp. 365.040 * Penambahan dari SP SABA Rp. 177.480 * Penambahan dari SP SABA Rp. 46.840 * Penambahan dari SP SABA Rp. 100.200 * Penambahan dari SP SABA Rp. 55.740 * Penambahan dari SP SABA Rp. 51.580 * Penambahan dari SP SABA Rp. 61.290	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota * Penambahan dari SP SABA Rp. 45.250 * Penambahan dari SP SABA Rp. 79.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 57.600 * Penambahan dari SP SABA Rp. 57.600 * Penambahan dari SP SABA Rp. 178.400
522141	Belanja Sewa * Penambahan dari SP SABA Rp. 28.890 * Penambahan dari SP SABA Rp. 25.760 * Penambahan dari SP SABA Rp. 129.310 * Penambahan dari SP SABA Rp. 288.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 32.100	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota * Penambahan dari SP SABA Rp. 225.500
522151	Belanja Jasa Profesi * Penambahan dari SP SABA Rp. 136.800 * Penambahan dari SP SABA Rp. 180.000		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV B. C A T A T A N



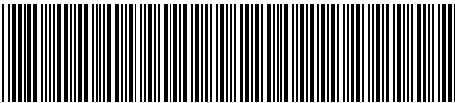
DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.B. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
524219	* Penambahan dari SP SABA Rp. 1.124.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 330.000 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri * Penambahan dari SP SABA Rp. 670.000	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya * Penambahan dari SP SABA Rp. 90.000
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda * Penambahan dari SP SABA Rp. 64.486.000	522111	Belanja Langganan Listrik * Penambahan dari SP SABA Rp. 750.000
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda * Penambahan dari SP SABA Rp. 117.900.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 26.914.000	522112	Belanja Langganan Telepon * Penambahan dari SP SABA Rp. 2.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin * Penambahan dari SP SABA Rp. 349.000	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya * Penambahan dari SP SABA Rp. 248.000
534121	Belanja Modal Irigasi * Penambahan dari SP SABA Rp. 505.675.000	522131	Belanja Jasa Konsultan * Penambahan dari SP SABA Rp. 11.000.000
2363.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Rp. 110.029.346	522141	Belanja Sewa * Penambahan dari SP SABA Rp. 250.560 * Penambahan dari SP SABA Rp. 105.204 * Penambahan dari SP SABA Rp. 300.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 300.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 204.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 300.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 9.260
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya * Penambahan dari SP SABA Rp. 975.000	522151	Belanja Jasa Profesi * Penambahan dari SP SABA Rp. 360.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 24.300 * Penambahan dari SP SABA Rp. 176.800 * Penambahan dari SP SABA Rp. 22.800 * Penambahan dari SP SABA Rp. 85.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 18.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 14.400 * Penambahan dari SP SABA Rp. 134.600 * Penambahan dari SP SABA Rp. 16.200
521211	Belanja Bahan * Penambahan dari SP SABA Rp. 422.590 * Penambahan dari SP SABA Rp. 460.440 * Penambahan dari SP SABA Rp. 437.888 * Penambahan dari SP SABA Rp. 294.230 * Penambahan dari SP SABA Rp. 62.820 * Penambahan dari SP SABA Rp. 36.210 * Penambahan dari SP SABA Rp. 60.424 * Penambahan dari SP SABA Rp. 1.390.000 * Penambahan dari SP SABA Rp. 30.665 * Penambahan dari SP SABA Rp. 64.280	522191	Belanja Jasa Lainnya * Penambahan dari SP SABA Rp. 275.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan * Penambahan dari SP SABA Rp. 170.750		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.1.622145/2025
IV B. C A T A T A N



DS:3636-1498-0529-1190

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [07] DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [622145] SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Halaman : IV.B. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
524111	* Penambahan dari SP SABA	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	* Penambahan dari SP SABA		* Penambahan dari SP SABA
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	* Penambahan dari SP SABA	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	* Penambahan dari SP SABA		* Penambahan dari SP SABA
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
524113	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
524114	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		
	* Penambahan dari SP SABA		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175